

Kinerja Pengelolaan Keuangan Dan Tingkat Kemandirian Pemerintah Kota Cilegon Berdasarkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015-2019

Vitriatie Nuzullestary

vitriatie2607@gmail.com

Bappeda Kota Cilegon, Banten, Indonesia

Euis Mulyaningsih

BPSDMD Provinsi Banten, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to determine the performance of financial management and the level of self-sufficiency of Cilegon City in 2015 - 2019. This study uses secondary data obtained from the Regional Financial Management Agency (BPKAD), as the regional apparatus authorized to manage regional finances of Cilegon City. The analysis used is the analysis of self-sufficiency ratios, effectiveness ratios, activity ratios and growth ratios. The results of the study concluded that the revenue of Cilegon City still depends on transfer funds (both from the Provincial Government and the Central Government), but has made efforts to increase self-sufficiency based on an average percentage of PAD growth of 2.82%. Based on the effectiveness ratio, Cilegon City government has been effective in realizing PAD as targeted. From the activity ratio, it shows that Cilegon City government prioritizes operational expenditure over development expenditure. Based on the growth ratio, it is obtained that the average growth is positive so that it can be concluded that the financial performance of Cilegon City Government for 5 years (2015 - 2019) is quite good even though it fluctuates per year.

Keywords ; Self-Sufficiency Ratios; Effectiveness Ratios; Activity Ratios, Growth Ratios

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pengelolaan keuangan dan tingkat kemandirian Pemerintah Daerah Kota Cilegon pada tahun 2015 – 2019. Penelitian menggunakan data sekunder yang didapat dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD), sebagai perangkat daerah yang berwenang dalam mengelola keuangan daerah Kota Cilegon. Analisis yang digunakan adalah analisis rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pendapatan Kota Cilegon masih bergantung pada dana transfer (baik dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat), namun telah berupaya untuk meningkatkan kemandirian berdasarkan rata-rata persentase pertumbuhan PAD sebesar 2,82%. Berdasarkan rasio efektivitas, Pemerintah Kota Cilegon sudah efektif merealisasikan PAD sesuai yang ditargetkan. Dari rasio aktivitas, menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Cilegon lebih memprioritaskan belanja operasi daripada belanja pembangunan. Berdasarkan rasio pertumbuhan, didapat rata-rata pertumbuhan bernilai positif sehingga bisa diambil kesimpulan kinerja keuangan Pemerintah Kota Cilegon selama 5 tahun (2015 – 2019) sudah cukup baik meskipun mengalami fluktuasi per tahunnya.

Kata Kunci ; Rasio Aktivitas; Rasio Efektivitas; Rasio Kemandirian; Rasio Pertumbuhan

INTRODUCTON

Sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 menyebutkan bahwa: *“Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut”*.

Keuangan Daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat daerah. Sebagaimana disampaikan oleh Pradono dan Basukianto (2015) bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan dengan tertib, efektif dan efisien, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Siklus tersebut dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan/pemeriksaan sampai pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (Raharja dkk, 2013).

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, posisi keuangan dan transaksi pemerintah daerah diinformasikan dalam Laporan keuangan Pemerintah Daerah per tahun, yang disajikan secara sederhana dan dapat dipahami oleh pembaca. Namun untuk mengetahui kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah, diperlukan analisis tertentu, salah satunya menggunakan metode analisis rasio. Hal ini disampaikan juga oleh Susanto (2019) dalam penelitiannya mengenai Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram.

Kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah telah banyak diteliti, dan beberapa menyimpulkan bahwa meskipun tingkat kemandirian daerah masih rendah namun kinerja pengelolaan keuangan daerah cukup baik (Hanik dan Karyanti, 2014; Kaunang dkk, 2016; Surastowo, 2019; dan Yuli,

2019). Demikian juga Welly dan Djuniar (2017), dari penelitian selama tahun 2009-2015 menyimpulkan bahwa tingkat kemandirian pemerintah provinsi Sumatera Selatan masih rendah namun dilihat dari rasio pertumbuhan, kinerja pengelolaan keuangan cukup baik. Selain itu, penelitian Saputra, dkk. (2018) pada Pemerintah Kabupaten Jembrana tahun 2010-2014 menyimpulkan bahwa pendapatan Pemerintah Daerah masih bergantung pada pendapatan yang bersumber dari eksternal (pemerintah provinsi/pusat), namun pertumbuhan pendapatan dan efisiensi belanja cukup baik.

Dalam penelitian ini, peneliti bermaksud untuk mengetahui kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Cilegon, dilihat dari rasio pertumbuhan (baik pendapatan maupun belanja), dan tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Cilegon, dilihat dari rasio kemandirian. Penelitian ini menggunakan data target dan realisasi APBD Kota Cilegon dalam jangka waktu 5 tahun (2015-2019). Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi bagi pemerintah Kota Cilegon agar dapat meningkatkan kinerja pengelolaan daerah menjadi lebih efektif dan efisien (Pilat dan Morasa, 2017).

LITERATUR REVIEW

Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian menunjukkan seberapa besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada bantuan pihak luar (baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat) dalam membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan (Ramadhani, 2016). Semakin besar rasio kemandirian, semakin kecil ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak luar, hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Orocomma, dkk. (2017). Ramadhani (2016) juga menyampaikan bahwa rasio kemandirian dapat menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun daerahnya, karena salah satu komponen PAD adalah pajak dan retribusi daerah yang disetorkan oleh masyarakat. Berikut rumus rasio kemandirian:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{PAD}{\text{Bantuan Pemprov/Pusat dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Kemudian ditentukan kriteria penilaian rasio kemandirian sesuai tabel berikut.

Tabel 1. Kriteria Rasio Kemandirian

Rasio Kemandirian	Kriteria Penilaian
0 – 25%	Rendah Sekali
25 – 50%	Rendah
50 – 75%	Sedang
75 – 100%	Tinggi

Sumber: Kepmendagri No.690.900-327/1996

Rasio Efektivitas

Tanan dan Duri (2018), Lubis dan Hafni (2017), serta Kusuma (2015) menjelaskan hasil penelitiannya bahwa rasio efektivitas menunjukkan kemampuan daerah dalam merealisasikan PAD yang ditargetkan pada tahun tertentu berdasarkan potensi riil daerah. Berikut ini rumus rasio efektivitas :

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

Ramadhani (2016) memberikan kriteria penilaian untuk rasio efektivitas sebagai berikut :

Tabel 2. Kriteria Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas	Kriteria Penilaian
< 60%	Tidak efektif
60 – 80%	Kurang efektif
80 – 90%	Cukup efektif
90 – 100%	Efektif
> 100%	Sangat efektif

Sumber : Kepmendagri No.690.900-327,1996

Semakin tinggi rasio efektivitas, pengelolaan PAD dikatakan semakin efektif.

Rasio Aktivitas

Menurut Lubis dan Hafni (2017) rasio aktivitas menunjukkan prioritas belanja Pemerintah Daerah dalam APBD. Rasio aktivitas dirumuskan untuk 2 jenis belanja yaitu : rasio belanja operasi dan rasio belanja pembangunan. Berikut rumusnya :

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

Rasio Pengelolaan Belanja

Rasio pengelolaan belanja menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja pada tahun tertentu. Jika terdapat selisih, maka kemungkinan terjadinya surplus/defisit anggaran (Fidelius, 2013). Surplus terjadi jika pendapatan lebih

besar daripada belanja, sedangkan defisit terjadi jika belanja lebih besar daripada pendapatan. Berikut rumus rasio pengelolaan belanja :

$$\text{Rasio Pengelolaan Belanja} = \frac{\text{Total Belanja}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan menunjukkan keberhasilan Pemerintah dalam mempertahankan atau meningkatkan pencapaiannya dari waktu ke waktu. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Welly dan Djuniar (2017). Rasio pertumbuhan dihitung untuk komponen APBD berikut :

$$\text{Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{PAD}_n - \text{PAD}_{n-1}}{\text{PAD}_{n-1}} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Pendapatan} = \frac{\text{Pendapatan}_n - \text{Pendapatan}_{n-1}}{\text{Pendapatan}_{n-1}} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Belanja Operasi} = \frac{\text{Belanja Operasi}_n - \text{Belanja Operasi}_{n-1}}{\text{Belanja Operasi}_{n-1}} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Belanja Pembangunan} = \frac{\text{Belanja Modal}_n - \text{Belanja Modal}_{n-1}}{\text{Belanja Modal}_{n-1}} \times 100\%$$

METHODS

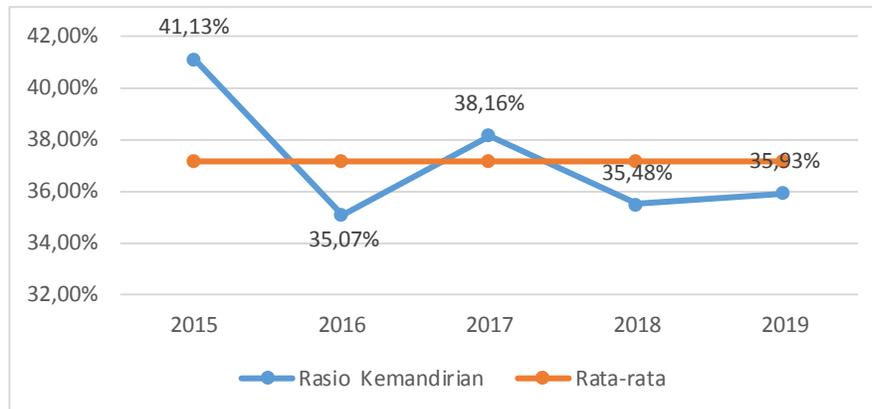
Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan data sekunder. Analisis yang digunakan dalam menganalisis kemandirian dan kinerja pengelolaan keuangan daerah Kota Cilegon adalah analisis rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang diambil dari BPKAD Kota Cilegon.

RESULT AND DISCUSSION

Kinerja pengelolaan keuangan dan tingkat kemandirian pemerintah Kota Cilegon dihitung berdasarkan data APBD selama 5 tahun (2015-2019) dengan metode analisis rasio. Analisis rasio terdiri dari rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio aktivitas (baik belanja rutin maupun belanja pembangunan) dan rasio pertumbuhan (baik pendapatan, PAD, belanja rutin maupun belanja pembangunan). Berikut ditampilkan hasil perhitungan masing-masing analisis rasio :

Rasio kemandirian dihitung dengan membandingkan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total pendapatan. Berdasarkan data keuangan daerah Kota Cilegon, didapatkan perhitungan rasio kemandirian yang ditunjukkan gambar berikut :

Gambar 1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Cilegon Tahun 2015 – 2019



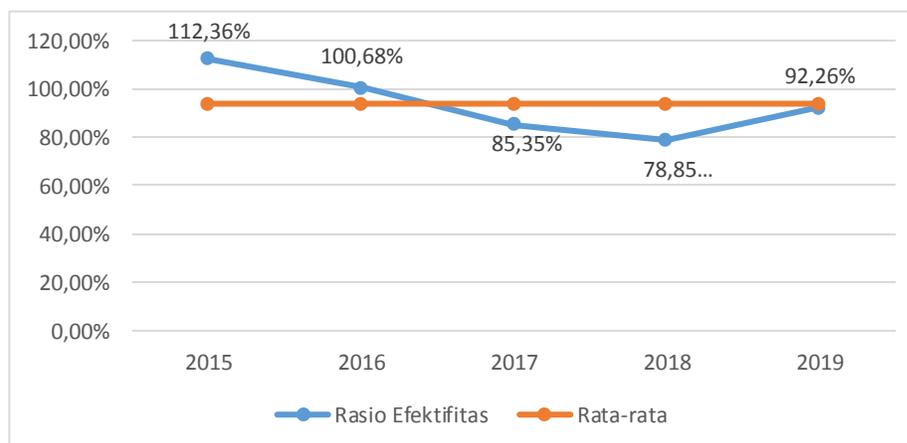
Sumber : BPKAD Kota Cilegon, diolah

Selama 5 tahun, hasil perhitungan rasio kemandirian per tahun menunjukkan bahwa keuangan daerah Kota Cilegon termasuk dalam kriteria penilaian rendah (<50%) dengan rata-rata sebesar 37,15%.

Rasio Efektivitas

Perhitungan rasio efektivitas adalah membandingkan realisasi dengan target penerimaan PAD. Perhitungan rasio efektivitas Kota Cilegon ditunjukkan pada gambar 2.

Gambar 2. Rasio Efektivitas PAD Kota Cilegon Tahun 2015 – 2019



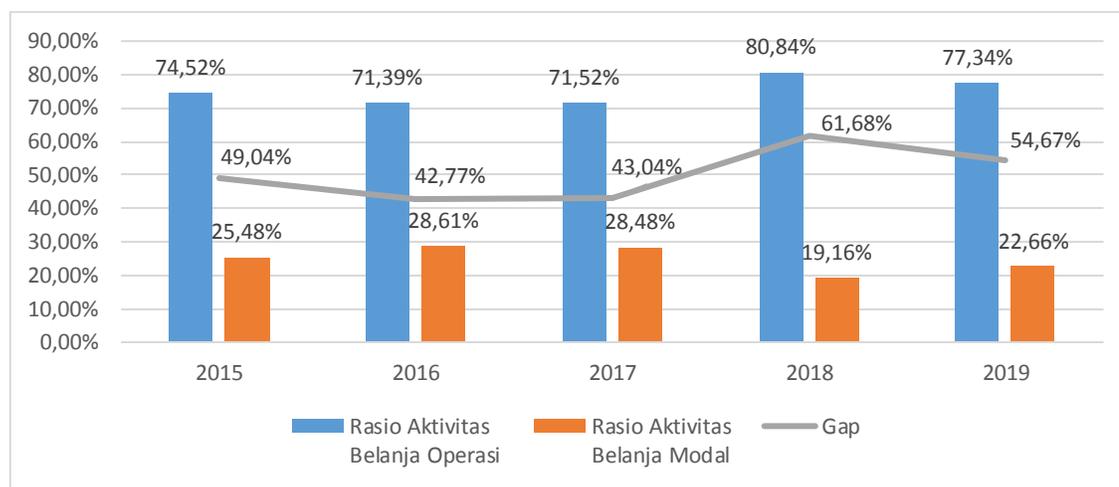
Sumber : BPKAD Kota Cilegon, diolah

Secara umum, rasio efektivitas PAD Kota Cilegon masih termasuk dalam kategori efektif, dengan rata-rata rasio efektivitas 93,90%.

Rasio Aktivitas

Selain dengan rasio kemandirian dan rasio efektivitas, dihitung pula rasio aktivitas. Rasio aktivitas dirumuskan dengan membagi antara jumlah dari jenis belanja dengan total belanjanya. Gambar 3 menunjukkan perhitungan rasio aktivitas ini dihitung untuk 2 (dua) jenis belanja, yaitu belanja operasi dan belanja pembangunan.

Gambar 3. Rasio Aktivitas Belanja Operasi dan Belanja Pembangunan
Kota Cilegon Tahun 2015 – 2019



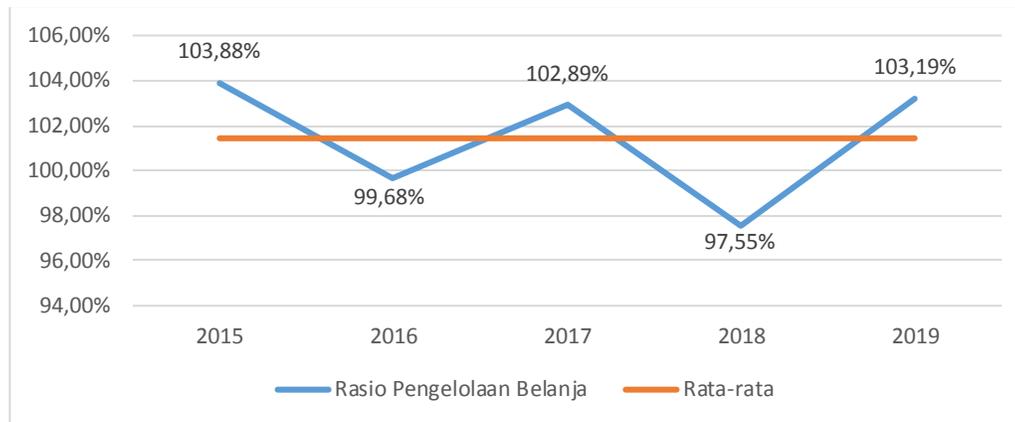
Sumber : BPKAD Kota Cilegon, diolah

Dari hasil perhitungan, rasio aktivitas belanja operasi Kota Cilegon per tahunnya selalu lebih besar daripada rasio aktivitas belanja pembangunannya. Dari grafik dapat terlihat bahwa ketika rasio belanja operasi mencapai titik tertinggi, maka rasio belanja pembangunan akan mencapai titik terendah. Hal ini berlaku sebaliknya, ketika rasio belanja operasi mencapai titik terendah, maka rasio belanja pembangunan akan mencapai titik tertinggi.

Rasio Pengelolaan Belanja

Rasio pengelolaan belanja membandingkan antara total pendapatan dan total belanja dalam APBD. Perhitungannya rasio pengelolaan belanja Kota Cilegon selama 5 tahun (2015 – 2019) ditampilkan pada gambar 4.

Gambar 4. Rasio Pengelolaan Belanja Kota Cilegon Tahun 2015 – 2019



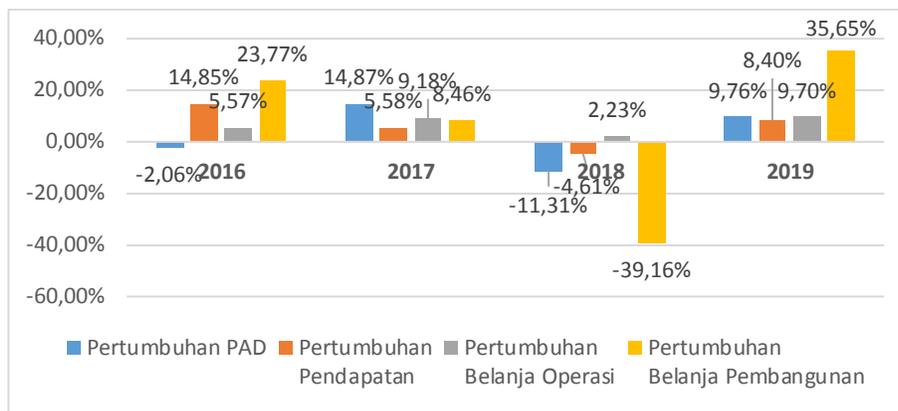
Sumber : BPKAD Kota Cilegon, diolah

Rasio pengelolaan belanja Kota Cilegon selama 5 tahun (2015 – 2019) mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, dengan rata-rata sebesar 101,44%.

Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan dihitung dengan membandingkan selisih komponen APBD antara tahun berjalan dan tahun sebelumnya. Hal ini untuk mengetahui apakah pemerintah mampu mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya dari waktu ke waktu. Gambar 1 menunjukkan rasio pertumbuhan komponen pembentuk APBD Kota Cilegon tahun 2015 – 2019, yaitu PAD, total pendapatan, belanja operasi dan belanja pembangunan. Tahun 2015 dianggap sebagai tahun dasar, maka tidak diperhitungkan rasio pertumbuhannya.

Gambar 5. Rasio Pertumbuhan PAD, Total Pendapatan, Belanja Operasi dan Belanja Pembangunan Kota Cilegon Tahun 2015 – 2019



Sumber : BPKAD Kota Cilegon, diolah

Hasil perhitungan rasio pertumbuhan selama 5 tahun untuk 4 komponen APBD menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Cilegon terendah pada tahun 2018, dimana perhitungan rasio pertumbuhan untuk 3 komponen APBD, yaitu PAD, pendapatan dan belanja pembangunan menunjukkan angka negatif.

RESULTS AND DISCUSSION

Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian membandingkan PAD dengan total pendapatan. Total pendapatan Kota Cilegon terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Sedangkan PAD Kota Cilegon terdiri dari pendapatan pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Perhitungan Rasio kemandirian tertinggi terjadi pada awal tahun penelitian yaitu tahun 2015, langsung mengalami penurunan tajam sampai terendah pada tahun 2016. Kemudian rasio kemandirian kembali naik di tahun 2017 sehingga diatas rata-rata, namun pada 2 tahun terakhir kembali dibawah rata-rata. Hal ini menunjukkan PAD Kota Cilegon belum cukup untuk memenuhi pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat, namun masih mengandalkan pendapatan yang bersumber dari eksternal, baik dari Pemerintah Provinsi maupun dari Pemerintah Pusat. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Fidelius (2013), Hanik dan Karyanti (2014) serta Welly dan Lis Djuniar (2017) yang mengambil kesimpulan bahwa masih rendahnya tingkat kemandirian Pemerintah Daerah karena sumber pendapatan daerah masih bergantung pada dana transfer dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat.

Rendahnya rasio PAD dibandingkan dengan total pendapatan pada beberapa daerah, bisa disebabkan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak dalam pembangunan daerah, ataupun terbatasnya informasi tentang potensi pendapatan daerah yang ada. Untuk itu, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai penyebab rendahnya PAD pada pemerintahan daerah dan penggalan potensi daerah yang ada, yang bisa meningkatkan pendapatan daerah.

Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas membandingkan realisasi PAD dengan targetnya. Hal ini menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD sesuai yang direncanakan (Welly dan Lis Djuniar, 2017). Semakin baik kinerja pemerintah dalam merealisasikan PAD, maka rasio efektivitas semakin tinggi atau mencapai 100%. Pada tahun pertama atau tahun 2015, didapat rasio efektivitas sebesar 112,36% masuk dalam kriteria sangat efektif, dalam arti pemerintah Kota Cilegon telah berhasil merealisasikan PAD (baik dari pajak, retribusi daerah maupun pendapatan asli daerah lainnya) sesuai dengan yang direncanakan/ditargetkan. Namun pada 3 tahun berikutnya terjadi penurunan rasio efektivitas PAD hingga mencapai rasio terendah pada tahun 2018 walaupun selama 5 tahun PAD Kota Cilegon cenderung naik, terutama pada tahun 2017 terjadi kenaikan yang cukup tinggi sebesar Rp 84,413 miliar. Hal ini menunjukkan walaupun PAD mengalami peningkatan, belum tentu dikatakan efektif dalam merealisasikan PAD, karena penentuan target PAD juga berpengaruh dalam rasio efektivitas. Untuk itu, Pemerintah Daerah sebaiknya menentukan target PAD sesuai potensi riil daerah, agar target PAD tersebut dapat tercapai. Pada tahun 2019 terdapat kenaikan rasio efektivitas menjadi sebesar 92,26%, masuk dalam kategori efektif. Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas di atas, secara umum rata-rata rasio efektivitas Kota Cilegon sebesar 93,90% atau masuk kategori efektif, yang berarti bahwa Pemerintah Kota Cilegon sudah efektif dalam merealisasikan PAD sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas membandingkan jenis belanja dengan total belanja dalam APBD, baik belanja operasi maupun belanja pembangunan. Semakin besar rasio aktivitas berarti semakin besar alokasi dana untuk belanja operasi atau belanja rutin dan semakin kecil alokasi dana untuk belanja pembangunan atau investasi yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat (Susanto, 2019). Pergerakan rasio aktivitas belanja operasi Kota Cilegon selama 5 tahun mengalami fluktuasi, dengan rata-rata rasio sebesar 75,12%, jauh lebih besar daripada rasio aktivitas belanja pembangunannya. Pergerakan rasio aktivitas belanja pembangunan atau belanja modal Kota Cilegon juga mengalami fluktuasi dengan rata-rata rasio sebesar 24,88%. Rasio aktivitas belanja operasi tertinggi terjadi pada tahun 2018, yaitu sebesar 80,84%, sebaliknya rasio aktivitas belanja pembangunan berada di titik terendah, yaitu sebesar 19,16%. Rasio aktivitas belanja operasi terendah terjadi pada tahun 2016, yaitu sebesar 71,39%, dimana rasio aktivitas belanja pembangunan berada di titik tertinggi, yaitu sebesar 28,61%.

Kesenjangan (gap) antara kedua rasio aktivitas tersebut pada tahun 2015 cukup tinggi, namun pada tahun berikutnya mulai turun menjadi 42,77% (gap terencah selama 5 tahun) dan pada tahun 2017 kembali naik namun tidak terlalu besar. Kesenjangan (gap) terbesar terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 61,68%, namun pada tahun 2019 kembali turun menjadi 54,67%.

Dari hasil penelitian rasio aktivitas di atas, diketahui bahwa rata-rata rasio aktivitas belanja operasi Kota Cilegon lebih besar daripada rata-rata rasio aktivitas belanja pembangunan. Hal ini berarti Pemerintah Kota Cilegon lebih memprioritaskan belanja operasi, yang terdiri dari belanja pegawai, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Parpol serta Belanja Tidak Terduga. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian Saputra, dkk. (2018) yang menyimpulkan bahwa pemerintah daerah menggunakan belanjanya lebih kepada belanja operasional daripada belanja pembangunan.

Rasio Pengelolaan Belanja

Perhitungan rasio pengelolaan belanja dapat menunjukkan terjadinya selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran (Fidelius, 2013). Jika pendapatan lebih besar daripada belanja (rasio pengelolaan belanja lebih dari 100%), maka akan terjadi selisih lebih (surplus). Sedangkan jika pendapatan kurang dari belanja (rasio pengelolaan belanja kurang dari 100%), maka akan terjadi selisih kurang (defisit). Kota Cilegon mengalami surplus pada tahun 2015, 2017 dan 2019 karena perhitungan rasio pengelolaan belanja Kota Cilegon melebihi 100%. Namun pada

tahun 2016 dan 2018, Kota Cilegon mengalami defisit anggaran karena rasio pengelolaan belanja kurang dari 100%.

Rasio pengelolaan belanja pada tahun 2015 merupakan rasio tertinggi selama 5 tahun, yaitu sebesar 103,88% dan rasio pengelolaan belanja pada tahun 2018 merupakan rasio terendah, yaitu sebesar 97,55%. Rata-rata perhitungan rasio pengelolaan belanja selama 5 tahun melebihi 100% yang berarti Kota Cilegon sudah berusaha untuk mengelola belanja tidak melebihi pendapatan daerah walaupun dalam pergerakannya mengalami fluktuasi

Rasio Pertumbuhan

Dengan rasio pertumbuhan, dapat diketahui kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah dalam meningkatkan atau mempertahankan capaiannya dari tahun ke tahun (Halim, 2012). Jika perhitungan rasio pertumbuhan positif ($>0\%$), maka pemerintah daerah berhasil meningkatkan capaiannya atau kinerja pemerintah daerah baik. Hasil perhitungan rasio pertumbuhan bisa menjadi bahan evaluasi komponen APBD mana yang sudah maupun belum optimal.

Berdasarkan perhitungan rasio pertumbuhan untuk 4 komponen APBD, menunjukkan bahwa : (1) Kinerja pengelolaan keuangan pada tahun 2016 sudah cukup baik walaupun terdapat pertumbuhan PAD yang negatif (-2,06%); (2) Rasio pertumbuhan untuk 4 komponen APBD pada tahun 2017 bernilai positif sehingga pada tahun ini pemerintah Kota Cilegon telah berhasil meningkatkan capaiannya; (3) Pada tahun 2018, rasio pertumbuhan untuk 3 komponen APBD (PAD, total pendapatan dan belanja pembangunan) bernilai negatif. Kurangnya kinerja pengelolaan keuangan pada tahun ini disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Pusat atas pemotongan alokasi Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil serta perubahan kebijakan Pemerintah Pusat atas pengelolaan pajak daerah atau retribusi daerah (LKPJ Kota Cilegon 2018); dan (4) Pada tahun 2019, rasio pertumbuhan untuk 4 komponen APBD bernilai positif sehingga pemerintah telah berhasil meningkatkan capaiannya.

Rata-rata pertumbuhan PAD sebesar 2,82%, rata-rata pertumbuhan pendapatan sebesar 6,05%, rata-rata pertumbuhan belanja operasi sebesar 6,67% dan rata-rata pertumbuhan belanja pembangunan sebesar 7,18%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Cilegon telah berupaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pengelolaan belanja daerah.

Secara umum, kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Cilegon cukup baik, walaupun pada tahun 2018 mengalami penurunan capaian. Pada tahun 2018 terdapat perubahan kebijakan dari pemerintah pusat, yang berdampak pada turunnya pendapatan dibanding tahun 2017. Namun tahun 2019 Pemerintah Kota Cilegon Kembali berupaya meningkatkan capaian kinerja pengelolaan belanja daerah dengan meningkatkan pendapatan daerah dan belanja daerah (baik belanja operasi maupun belanja modal).

Keberhasilan Pemerintah Kota Cilegon dalam pengelolaan keuangan masih dipengaruhi oleh kebijakan eksternal, baik dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Hal ini terlihat ketika terdapat perubahan kebijakan Pemerintah Provinsi/Pusat, akan berdampak pada kinerja pemerintah Kota Cilegon.

CONCLUSIONS

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa : (1) Berdasarkan rata-rata rasio kemandirian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Cilegon belum mandiri dalam membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan atau masih bergantung pada dana transfer yang berasal dari Pemerintah Provinsi/Pusat; (2) Berdasarkan rata-rata efektivitas PAD, Pemerintah Kota Cilegon sudah berupaya dalam merealisasikan PAD sesuai dengan yang ditargetkan; (3) Berdasarkan rata-rata rasio aktivitas belanja, pengelolaan belanja Pemerintah Kota Cilegon lebih menitikberatkan belanja operasi/rutin daripada belanja pembangunan yang ditunjukkan rata-rata rasio aktivitas belanja operasi sebesar 75,12% dan rata-rata rasio aktivitas belanja pembangunan sebesar 24,88%; (4) Kinerja pengelolaan keuangan daerah dilihat dari rata-rata rasio pertumbuhan 4 komponen APBD bernilai positif, menunjukkan pemerintah Kota Cilegon telah berupaya mempertahankan dan meningkatkan capaiannya dari tahun ke tahun baik capaian pendapatan maupun capaian belanja ; (5) Karena ketergantungan pemerintah daerah pada pendapatan yang bersumber dari eksternal (Pemerintah Provinsi/Pusat) mengakibatkan kinerja pengelolaan daerah sangat dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah Provinsi/Pusat.

Dari hasil penelitian di atas, maka berikut ini saran dari peneliti : (1) Pemerintah Kota Cilegon harus dapat meningkatkan Pendapatan, terutama yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, sehingga dapat meningkatkan kemandirian daerah dalam membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah. (2) Pemerintah Kota Cilegon harus dapat meningkatkan belanja pembangunan dan mengurangi

belanja operasi, agar pembangunan sarana dan prasarana di daerah lebih merata dan dirasakan oleh seluruh masyarakat Kota Cilegon.

REFERENCES

- Fidelius. 2013. Analisis Rasio untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Manado. *Jurnal EMBA* Vol. 1, 4, 2088-2096.
- Halim, Abdul & Kusufi, Muhammad Syam. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta. Salemba Empat.
- Hanik, Fitri Umi & Karyanti, Tutik Dwi. 2014. Analisis Rasio Keuangan Daerah sebagai Penilaian Kinerja (Studi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang). *JABPI* Vol. 22, 2, 143-156.
- Kaunang, Cheris Enjelita; Naukoko, Amran T.; Londa, Albert T. 2016. Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah di Era Otonomi Daerah: Studi Pada Kota Manado (Tahun 2010-2014). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* Volume 16, 2, 355-365.
- Lubis, Putri Kemala Dewi & Hafni, Nurlia. 2017. Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2011-2013. *KITABAH* Vol. 1, 1, 20-45.
- Orocomma, Manasep; Bharanti, B. Elita; Layuk, Paulus K. Allo. 2017. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2010-2015. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah* Vol. 2, 3, 1-17.
- Pilat, Juddy Julian & Morasa, Jenny. 2017. Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011-2015. *Jurnal Accountability* Vol. 6, 1, 45-56.
- Pradono, Febrian Cahyo & Basukianto. 2015. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Faktor yang Mempengaruhi dan Implikasi Kebijakan (Studi pada SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)* Vol. 22, 2, 188-200.
- Raharja, Mega; Pratiwi, Ratih Nur; Wachid, Abdul. 2013. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kabupaten Lamongan). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* Vol. 3, 1, 111-117.
- Ramadhani, Febby Randria. 2016. Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah di Kota Tarakan Tahun 2010-2015. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 14, 1, 85-98.
- Saputra, Sandy Candra; Suwendra, I Wayan; Yudiaatmaja, Fridayana. 2018. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Jember Tahun 2010-2014. *Bisma: Jurnal Manajemen* Vol. 4, 2, 136-145.
- Surastowo. 2019. Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. *Jurnal Simplex* Vol. 2, 3, 175-185.
- Susanto, Herry. 2019. Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Jurnal Distribusi: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis* Vol. 7, 1, 81-92.

- Tanan, Christina Irwati & Duri, Jimmi Ari. 2018. Analisis Rasio untuk Pengukuran Kinerja Keuangan dan Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah (Studi Kasus Pemerintah Kota Jayapura). *Future Jurnal Manajemen dan Akuntansi* Vol. 6, 1, 91-101.
- Wahab, La Ode Abdul; Rofingatun, Siti; Kreuta, Balthazar. 2017. Analisa Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Jayapura. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah* Vol. 2, 3, 1-12 .
- Welly & Djuniar, Lis. 2017. Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2009 – 2015. *Jurnal Ekonomi/Volume XXII,1*, 1-21.
- Yuli, Norma. 2019. Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Sigi. *e Jurnal Katalogis* Vol. 5, 7, 97-108.